

PENCEGATAN PESAWAT MILITER CHINA OLEH MALAYSIA: TANTANGAN BARU BAGI KAWASAN?

7

Rizki Roza

Abstrak

Jet tempur Hawk dari Royal Malaysian Air Force melakukan pencegahan terhadap pesawat militer China pada 31 Mei karena dianggap mengancam kedaulatan Malaysia dan mengganggu keselamatan penerbangan. Tulisan singkat ini memaparkan pengaruh insiden tersebut pada hubungan bilateral kedua negara serta implikasinya terhadap stabilitas perdamaian dan keamanan di kawasan. Kedekatan hubungan bilateral Malaysia-China telah menempatkan Malaysia untuk sangat berhati-hati dalam bersikap terhadap China. Sangat kecil kemungkinan insiden ini akan mendorong kedua negara untuk mempertimbangkan opsi militer. Tetapi insiden ini akan menjadi pendorong bagi Malaysia untuk mengurangi ketergantungan terhadap China. Kehadiran kekuatan udara China dapat dilihat sebagai bagian dari rencana perluasan peran PLAAF, sekaligus kelanjutan dari upaya China menegaskan klaimnya di Laut China Selatan (LCS). Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu peningkatan kehadiran kekuatan militer dari negara lainnya untuk merespons, yang biasanya berujung pada ketegangan. Indonesia, baik pemerintah maupun parlemen, perlu mendorong negara-negara di kawasan untuk terus meningkatkan kerja sama dan menekan potensi konflik di LCS.

Pendahuluan

Angkatan Udara Malaysia (Royal Malaysian Air Force/RMAF) menyatakan bahwa pada 31 Mei mereka telah mencegah 16 pesawat militer China yang terbang mendekati wilayah udara Malaysia. Pencegatan dilakukan setelah serangkaian upaya komunikasi dan identifikasi dijalankan. Menganggap 16 pesawat itu terbang dengan manuver yang mencurigakan dan tidak mendapat respons komunikasi, RMAF mengerahkan jet tempur Hawk dari Squadron 6 di Pangkalan Udara Labuan

untuk melakukan identifikasi visual dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan wilayah udara negaranya. Pernyataan resmi Pemerintah Malaysia dengan tegas menyebut manuver pesawat militer China itu sebagai ancaman bagi kedaulatan negaranya, dan membahayakan lalu lintas udara yang cukup padat di sekitar *Flight Information Region* (FIR) Kota Kinabalu. Pemerintah Malaysia menyatakan akan mengajukan nota protes kepada Pemerintah China (www.reuters.com, 2 Juni 2021).



Insiden ini penting untuk dicermati oleh negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Insiden ini dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan antara kedua negara, dan dalam kondisi terburuk bisa memicu keterlibatan kekuatan militer. Terjadi di sekitar ruang udara wilayah sengketa Laut China Selatan (LCS), insiden ini mungkin saja berdampak pada upaya penyelesaian sengketa atau bahkan memicu eskalasi yang akan merusak stabilitas perdamaian dan keamanan di kawasan. Tulisan singkat ini membahas bagaimana insiden ini akan mempengaruhi hubungan bilateral Malaysia-China beserta potensi konflik antara kedua negara; dan bagaimana implikasi insiden ini terhadap stabilitas perdamaian dan keamanan di LCS.

Potensi Konflik Bilateral

Jika melihat secara historis, tidak terdapat catatan sejarah yang negatif terkait hubungan antara Malaysia dan China. Kedua negara juga memiliki hubungan budaya yang mendalam akibat keberadaan etnis Tionghoa yang signifikan di Malaysia, dan ini cukup mempengaruhi hubungan kedua negara. Sejarah juga mencatat hubungan bilateral yang istimewa antara kedua negara, yaitu Malaysia merupakan negara anggota ASEAN pertama yang melakukan normalisasi hubungan dengan China pada tahun 1974 di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Tun Razak. Secara umum, hubungan bilateral kedua negara memiliki fondasi yang kuat dan kokoh. Hubungan kerja sama yang terus berkembang telah menempatkan China sebagai mitra ekonomi utama Malaysia. Sejak tahun 2009 China tercatat sebagai mitra dagang terbesar Malaysia, dan bertahan hingga saat ini. Demikian pula sebaliknya, Malaysia merupakan salah

satu mitra dagang penting bagi China.

Kedekatan hubungan kedua negara dalam beberapa tahun terakhir mengalami sedikit pergeseran, terutama sejak PM Mahathir Mohamad menjabat pada 2018. Mahathir mengisyaratkan keinginannya untuk mengurangi ketergantungan Malaysia terhadap China dan mengembalikan kedekatan dengan Jepang seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahannya pada tahun 1981 hingga 2003. Berbagai langkah dijalankan pemerintahan Mahathir untuk tujuan itu, termasuk dengan menempatkan Jepang sebagai tujuan pertama kunjungan kerja luar negerinya, berupaya mengurangi hutang ke China, merundingkan kembali beberapa “perjanjian yang tidak setara” dengan China, mengajukan pinjaman ke Jepang, hingga memperluas kerja sama dengan Jepang. Jepang sebagai mitra strategis dan mitra dagang terbesar keempat Malaysia menyambut baik langkah Mahathir ini (www.thediplomat.com, Juni 2018).

Upaya PM Mahathir mempererat hubungan dengan Jepang ternyata tidak serta merta menghambat berkembangnya hubungan kerja sama Malaysia-China. Posisi China sebagai mitra utama Malaysia tampaknya masih sulit untuk digeser. Bahkan sebagian pihak di dalam negeri Malaysia melihat hubungan Malaysia-China semakin erat sejak Menteri Luar Negeri (Menlu) Hishammuddin Hussein menjabat.

Kedekatan hubungan kedua negara yang terus terpelihara kemudian secara nyata telah mempengaruhi pilihan pendekatan yang dijalankan Malaysia dalam memperjuangkan kepentingannya atas LCS. Malaysia lebih cenderung untuk melakukan komunikasi langsung dan tertutup kepada China setiap ada keluhan terkait persoalan LCS. Pendekatan ini berbeda dengan yang biasa dilakukan negara *claimant* lainnya, seperti Vietnam

atau Filipina yang lebih menyampaikan keluhannya secara terbuka. Pendekatan ini setidaknya dipegang teguh hingga masa pemerintah PM Najib Razak. Sebagian pengamat menyebut Malaysia “bermain aman” dalam mengelola persoalan LCS, yaitu menjaga keseimbangan antara memperjuangkan kepentingan nasionalnya atas LCS, dan menghindari terganggunya hubungan bilateral dengan China (Prashanth: 2015).

Dinamika persoalan LCS telah melahirkan desakan dari dalam dan luar negeri agar Malaysia mengkaji ulang ‘pendekatan aman’-nya terhadap LCS. Sejumlah insiden di LCS yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan sedikit pergeseran sikap Malaysia. Insiden pada Juni 2015 dapat dianggap sebagai salah satu insiden penting yang mempengaruhi sikap Malaysia. Insiden itu melibatkan sebuah kapal penjaga pantai China (China Coast Guard/CCG) yang berlabuh di perairan Luciana Shoals, hanya 84 mil laut dari pantai Sarawak, jauh di dalam ZEE Malaysia. Insiden itu sangat mengusik kedaulatan Malaysia, dan menegaskan bahwa insiden itu bukan bagian dari tumpang tindih klaim, melainkan penyusupan kapal asing ke perairan Malaysia. Sejak insiden itu Malaysia lebih berani secara terbuka mengajukan protes diplomatik terhadap China terkait sengketa LCS.

Insiden lainnya yang juga penting adalah ketegangan yang berlangsung selama berbulan-bulan hingga menempatkan banyak kapal, tidak hanya dari Malaysia dan China, tetapi juga dari Vietnam, AS, dan Australia berhadapan di perairan LCS. Insiden ini dimulai pada Desember 2019 ketika kapal patroli CCG beroperasi dan mengintimidasi kegiatan eksplorasi minyak dan gas yang sedang dilakukan kapal West Capella yang dikontrak

oleh Petronas di perairan yang diklaim oleh Malaysia sebagai kepanjangan landas kontinennya. Dihadapkan pada ketegangan dengan potensi tinggi terjadinya salah perhitungan dan gesekan di lapangan, Malaysia tetap menerapkan pendekatan tradisionalnya yang berhati-hati.

Meskipun dalam beberapa tahun terakhir terdapat pergeseran pendekatan, perlu digarisbawahi bahwa semua itu tetap dilakukan secara hati-hati dan terukur. Malaysia masih berupaya untuk tidak memicu respons dari China yang dapat meningkatkan ketegangan dan merusak kedekatan kedua negara. Dan sikap ini masih dipegang sekalipun insiden pelanggaran wilayah maritim oleh China berulang kali terjadi hingga saat ini.

Jika merujuk pada kondisi yang diuraikan di atas, sangat kecil kemungkinan kedua negara akan mengambil opsi penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan persoalan di antara mereka. Tetapi insiden ini tentu akan kembali menjadi dorongan bagi Malaysia untuk mengurangi ketergantungan terhadap China, meningkatkan kerja sama keamanan dengan kekuatan lainnya, dan melanjutkan upaya peningkatan kapabilitas pertahanannya. Insiden terbaru ini juga menjadi peringatan bagi Malaysia bahwa mereka juga memiliki kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kemampuan pengawasan wilayah udaranya.

Implikasi terhadap Kawasan LCS

Insiden manuver 16 pesawat militer China terjadi di sekitar wilayah LCS yang diperebutkan oleh Malaysia dan China. Namun insiden ini tidak cukup jika dilihat terbatas pada konteks sengketa antara kedua negara. Pesawat militer China ini terbang hingga bagian paling selatan dari klaim *9-dash line* China, jauh dari wilayah

daratan China. Manuver pesawat militer China ini dapat memiliki arti strategis bagi klaim sengketa LCS secara keseluruhan. Sebelum memperkirakan dampak insiden ini terhadap kawasan LCS, perlu dipahami terlebih dahulu peran angkatan udara bagi militer China.

Angkatan Udara China (People's Liberation Army Air Force/PLAAF), lahir dan tumbuh terbatas hanya sebagai elemen pendukung bagi kekuatan daratnya dalam menjaga wilayah teritorial China. Perkembangan tantangan dan ancaman pernah beberapa kali mendorong upaya untuk memperkuat dan memperluas angkatan udara, namun gagal karena fokus China pada pengamanan teritori. Perubahan dapat terjadi setelah tumbuh kesadaran pada para pemimpin Partai Komunis China dan Angkatan Bersenjata China (People's Liberation Army/PLA) mengenai pentingnya kekuatan udara dalam pertempuran modern, adanya kebutuhan kekuatan udara China untuk melakukan operasi ofensif, independen, dan di luar perbatasan China. Perubahan mendasar PLAAF baru mulai terjadi pada tahun 2004 ketika konsep "*strategic air force*" diterima dan menjadi panduan untuk memperluas peran PLAAF.

Sejak itu, upaya penguatan dan pengembangan PLAAF terus dilakukan. PLA menginginkan PLAAF yang memiliki kemampuan operasi di atas wilayah perairan, menjangkau jauh melampaui daratannya. PLA mulai mengupayakan lokasi di luar negeri di mana PLAAF dapat beroperasi, baik sebagai bagian dari kehadiran pangkalan luar negeri pertama PLA di Djibouti atau melalui beberapa perjanjian akses. Departemen Pertahanan AS telah mengindikasikan sejumlah lokasi di luar negeri di mana China mungkin berusaha untuk membangun fasilitas atau akses militer untuk memperluas jangkauan

militernya. Tanpa perebutan wilayah di LCS pun, sudah menjadi agenda PLA meningkatkan kemampuan PLAAF untuk hadir jauh di luar teritori China.

Jika mengaitkan manuver 16 pesawat militer China dengan dinamika sengketa LCS dalam beberapa tahun terakhir, manuver tersebut dapat dilihat sebagai upaya penegasan klaim China atas perairan LCS. Bagi China, ini bukan merupakan sesuatu yang baru, melainkan hanya kelanjutan dari langkah-langkah yang telah diambil sebelumnya untuk menegaskan klaimnya atas LCS. Ini merupakan kelanjutan dari sikap China yang semakin asertif di LCS; diikuti dengan reklamasi sejumlah titik di LCS sehingga menjadi pulau yang memungkinkan memberi dukungan operasi militer; peningkatan kegiatan patroli CCG di wilayah LCS; hingga mengadopsi undang-undang yang memberi kewenangan pada CCG untuk melakukan penembakan terhadap kapal asing di perairan yurisdiksi China di LCS.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan tidak ada perubahan mendasar dari pendekatan China terhadap LCS. China hanya meneruskan rencana pengembangan PLAAF dan juga meneruskan langkah-langkah penegasan klaimnya di LCS. China masih berada pada pola yang sama, sebagaimana pandangan yang pernah diungkapkan sejumlah ahli lainnya. China berada pada posisi tidak akan mundur atas setiap klaimnya.

Sekalipun bukan sesuatu yang baru bagi China, ini akan memiliki dampak signifikan bagi negara-negara yang berkepentingan di kawasan. Kehadiran pesawat militer China menegaskan semakin kokohnya dominasi China di LCS. Kehadiran kekuatan udara China di LCS akan mendesak negara-negara yang bersengketa untuk tidak hanya melakukan penguatan angkatan laut,

tetapi juga memperkuat kapabilitas pertahanan dan pengawasan udara untuk melindungi kedaulatan di ruang udara nasional dan melindungi wilayah yurisdiksi, serta mengimbangi dominasi China di LCS. Kebutuhan ini juga perlu direspons oleh negara yang berbatasan dengan wilayah sengketa seperti Indonesia, untuk memiliki kekuatan udara yang memadai untuk melindungi ruang udara nasional, dan untuk memberikan efek *deterrent* yang kredibel terhadap pihak-pihak asing yang berpotensi melakukan agresi.

Di samping itu, catatan ketegangan di LCS dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa peningkatan dominasi China di LCS akan disusul upaya kekuatan besar lainnya untuk meningkatkan kehadiran demi menjaga kebebasan navigasi di LCS. AS merupakan kekuatan utama yang telah berulang kali hadir untuk merespons setiap tindakan China di LCS. Situasi yang kerap berujung pada ketegangan inilah yang juga perlu dikhawatirkan oleh negara-negara di kawasan.

Insiden ini semestinya juga menjadi dorongan bagi Indonesia, Malaysia, dan negara lainnya di kawasan untuk bersama-sama mengoptimalkan setiap forum dan mekanisme yang tersedia untuk meningkatkan kerja sama dan menekan potensi terjadi konflik di LCS. Meskipun telah mengalami kebuntuan selama beberapa waktu, pembicaraan mengenai *code of conduct* (COC) perlu diupayakan kembali. Tidak hanya pemerintah, DPR RI juga dapat berperan dalam mendorong upaya ini melalui berbagai forum kerja sama antarparlemen.

Penutup

Kedekatan hubungan bilateral Malaysia-China telah menempatkan Malaysia untuk sangat berhati-hati dalam memperjuangkan kepentingannya di LCS

agar tetap menjaga hubungan baiknya dengan China. Sangat kecil kemungkinan insiden manuver 16 pesawat militer China akan mendorong kedua negara untuk mempertimbangkan opsi militer dalam menyelesaikan persoalan itu. Insiden itu setidaknya akan menjadi pendorong bagi Malaysia untuk mengurangi ketergantungan terhadap China, dan menjadi peringatan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan wilayah udaranya.

Insiden tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari rencana perluasan peran PLAAF, sekaligus kelanjutan dari upaya China menegaskan klaimnya di LCS. Peningkatan kehadiran kekuatan udara China dikhawatirkan akan memicu peningkatan kekuatan militer dari negara lainnya untuk merespons, yang biasanya berujung pada ketegangan yang mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan kawasan. Indonesia, baik pemerintah maupun parlemen, perlu mendorong negara-negara di kawasan untuk meningkatkan kerja sama dan menekan potensi konflik di LCS, termasuk dengan berupaya melanjutkan kembali pembicaraan mengenai *code of conduct* (COC).

Referensi

“China remains Malaysia’s largest trading partner for 11th year”, <https://themalaysianreserve.com/2020/12/31/china-remains-malysias-largest-trading-partner-for-11th-year/> diakses 2 Juni 2021.

“Japan First? Tokyo Welcomes Malaysia’s Repositioning on China”, <https://thediplomat.com/2018/06/japan-first-tokyo-welcomes-malysias-repositioning-on-china/> diakses 2 Juni 2021.

Kuo, Mercy A. (2021), “Assesing 70 Years of China’s PLA Air Force”, <https://thediplomat.com/2021/05/>

assessing-70-years-of-chinas-pla-air-force/ diakses 1 Juni 2021.

Malaysia to summon Chinese envoy over 'suspicious' air force activity, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-says-chinese-military-planes-came-close-violating-airspace-2021-06-01/> diakses 2 Juni 2021

"Malaysia is independent, says minister whi called Chinese counterpart 'elder brother'", <https://www.reuters.com/article/us-malaysia-diplomacy-china-idUSKBN2BQ0BP> diakses 2 Juni 2021.

Parameswaran, Prashanth (2021), "Malaysia's South China Sea Policy: Playing It Safe", <https://thediplomat.com/2015/03/malysias-south-china-sea-policy-playing-it-safe/> diakses 2 Juni 2021.

Wey, Adam Leong Kok (2021), "Chinese Overflight Highlights Malaysia's Need for a Stronger Military Deterrent", <https://thediplomat.com/2021/06/chinese-overflight-highlights-malysias-need-for-a-stronger-military-deterrent/> diakses 5 Juni 2021.



Rizki Roza
rizki.roza@dpr.go.id

Rizki Roza, S.Ip., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2003 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Confidence Building Measures dan Program nuklir Iran" (2010); "Konflik Laut China Selatan dan implikasinya terhadap modernisasi militer" (2013); dan "Kerjasama internasional dan Peran industri sipil dalam industri pertahanan" (2013).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.